

## PROGRAM TRI (TEBU RAKYAT INTENSI) DI KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO 1975-1980

**Luluk Masluchah**

Jurusan Pendidikan Sejarah,  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

**Septina Alrianingrum**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

### ABSTRAK

Program TRI (Tebu Rakyat Intensif) merupakan wujud implementasi pemerintah guna meningkatkan hasil produktivitas tebu. Program tersebut dicanakan pada tahun 1975, namun di tengah pelaksanaannya banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya bagi daerah yang terkenal dengan sentra utama penghasil tebu yang salah satunya di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya pada 3 masalah yaitu Latar Belakang Pemerintah mengeluarkan program TRI (Tebu Rakyat Intensif), Pola pelaksanaan TRI (Tebu Rakyat Intensif), Dampak program TRI di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto 1975- 1980. Tujuan penulis dalam hal ini yaitu untuk mengetahui meningkat atau tidaknya produktivitas tebu setelah dicanangkan program TRI serta untuk mengetahui seberapa jauh dampak program TRI bagi tingkat kesejahteraan para petani tebu. Secara umum program TRI tersebut berdampak pada Pabrik Gula dan para petani besar sedangkan merugikan bagi para petani kecil. Hal itu dikarenakan petani besar mempunyai modal sedangkan Pabrik gula mempunyai kewenangan mentarget berapa banyak gula yang harus dihasilkan namun tenaga buruh tani dan para petani kecil tidak memadai. Ditambah lagi kurangnya modal yang dialami oleh para petani kecil.

**Kata Kunci:** Program TRI, dampak bagi masyarakat.

### ABSTRACT

Industrial development sugar in every phase of undergoing change rule, ranging from system profit sharing until in the farmers the people. Farmers the people is known with the term stated. The tri is the result of presidential instruction no.9 1975. By the program expected to build a proper relationship between parties sugar manufacturer and farmers. The fact that in the implementation of the TRI program experiencing irregularities particularly in Java. It is caused by the development of sugar manufacturer Centre at most there are in Java especially location in the village of Puri Mojokerto district of the piece.

**Keywords:** TRI, Results from TRI.

### PENDAHULUAN

Tahun 1930, perkembangan industri gula di Indonesia boleh dikatakan telah mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi negara pengekspor nomor dua terbesar di dunia setelah Brazil. Pada waktu itu, jumlah pabrik gula di Indonesia telah mencapai 179 buah dengan luas areal tanaman tebu sekitar 199.000 hektar. Produksi pabrik gula menghasilkan produksi tertinggi tahun 1928 dengan jumlah produksi 2,95 juta ton,

sedangkan rata-rata yang diperoleh dari lahan subur di Jawa mencapai 178,4 kwintal gula per hektarnya<sup>1</sup>.

Jumlah tebu rakyat yang digilingkan ke pabrik gula juga meningkat, sehingga karena sumbangannya yang semakin besar itu Pada masa sebelumnya jumlah tebu rakyat yang digilingkan ke pabrik gula relatif sangat sedikit. Karena tebu rakyat semakin dirasa penting sebagai sumber bahan baku gula yang potensial maka pada tahun 1953 didirikan Yatra (Yayasan Tebu Rakyat)

<sup>1</sup> Adig Suwandi, "Strategi dan peluang swasembada Gula", dalam *Surabaya Post*, 3 November 1989.

yang mempunyai tugas mendorong tumbuhnya tebu rakyat dengan memberikan bantuan bimbingan teknis dan kredit untuk mengusahakan tanaman tebu. Sedangkan tanggung jawab penanaman tebu diserahkan pada petani.

Para petani tebu dihipung dalam wadah koperasi untuk mengadakan kontrak dengan pabrik gula yang akan mengolah tebunya. Oleh karena itu sejak tahun 1951 istilah tebu rakyat itu mulai populer.<sup>2</sup> Pengelolaan tebu rakyat semula memakai sistem sewa, namun tahun 1960 akibat terjadinya inflasi yang cukup tinggi, sistem sewa diubah menjadi sistem bagi hasil antara petani dengan pihak pabrik. Setelah keadaan rupiah membaik baru diubah lagi ke sistem sewa. Akan tetapi, hal inipun tidak bertahan lama, memasuki tahun 1975 pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Pelaksanaan TRI diterapkan di beberapa daerah di Jawa seperti juga di Mojokerto. Sesuai dengan Inpres No. 9/1975, prinsip dari program TRI adalah untuk mengganti sistem sewa menjadi suatu sistem petani diberi hak untuk mengolah tanahnya sendiri. Secara umum, tujuan dari program TRI adalah untuk menjaga stabilitas kebutuhan gula secara nasional.<sup>3</sup>

Sejak adanya Inpres No. 9 Tahun 1975, luas areal tebu terus meningkat. Selama periode 1975-1980, areal tebu meningkat dari 104.777 Ha menjadi 188.772 Ha atau meningkat 80,17%. Sementara produksi gula meningkat dari 1.035.000 ton menjadi 1.249.000 ton atau meningkat 20,68%. Namun kenyataannya produktivitas gula tetap mengalami penurunan kira-kira 5% per tahun.

Kejadian seperti ini menjadikan petani sebagai obyek penderita karena petani menderita kerugian-kerugian pada ketiga tahapan diatas. Tidak jarang kerugian petani berbentuk teror mental seperti tekanan fisik dan kekerasan yaitu pembunuhan pada petani yang tidak patuh terhadap aturan yang diterapkan oleh aparat desa. Ada beberapa contoh kasus<sup>4</sup> teror mental seperti petani ditakuti dengan senjata tajam, dipaksa datang ke balai desa untuk menghadiri rapat-rapat.

Melihat berbagai kerugian diatas, maka tidak mengherankan jika banyak petani yang terkesan enggan bahkan sama sekali menolak program TRI. Akan tetapi, bukan berarti secara keseluruhan program TRI dinyatakan gagal dan membawa kerugian bagi petani. Berbalikan dengan fakta-fakta tentang kerugian petani

seperti diuraikan diatas, sebenarnya tidak jarang juga ada sebagian petani lain yang merasa diuntungkan dengan adanya program TRI. Menurut penelitian dari sebagian pengamat masalah TRI, beberapa petani yang mampu memperoleh keuntungan dari menanam tebu TRI itu dikarenakan mereka secara tertib mentaati semua ketentuan administratif maupun ketentuan teknis dalam bercocok tanam tebu.

Selama pendudukan Jepang, kegiatan industri gula berhenti dan baru tahun 1950 kegiatan ini dimulai kembali dengan pengelolaan oleh diserahkan ke pihak swasta. Hal tersebut mendorong berubahnya pengelolaan pabrik gula dan tanaman tebu. Perusahaan tersebut semula diubah menjadi PN (Perusahaan Negara), kemudian berubah menjadi PPN (Perusahaan Perkebunan Negara). Lalu PPN diubah lagi menjadi PNP (Perusahaan Perkebunan Negara). Belakangan PNP diubah lagi menjadi PTP (PT. Persero) hingga sekarang.<sup>5</sup>

Pada awal kemerdekaan kondisi perekonomian banyak mengalami masalah sehingga terjadi inflasi yang sangat tinggi. Hal itu dikarenakan beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Keadaan tersebut akhirnya juga berimbas pada sistem pengelolaan pabrik gula dan tanaman tebu. Mula-mula dipakai sistem sewa untuk pengelolaan tebu, namun pada tahun 1960 sistem sewa diubah menjadi sistem bagi hasil antara petani dengan pihak pabrik. Setelah keadaan rupiah membaik baru diubah lagi ke sistem sewa.<sup>6</sup> Akan tetapi, hal inipun tidak bertahan lama.

Memasuki awal tahun 1974 hampir di seluruh dunia terjadi kenaikan minyak bumi yang diikuti dengan kenaikan BBM, tidak terkecuali Indonesia juga terkena dampaknya.<sup>7</sup> Harga bahan pokok di dunia sudah mengalami kenaikan, tidak terkecuali harga gula. Sementara itu, harga gula di Indonesia belum mengalami kenaikan. Tentunya hal tersebut merugikan bagi petani tebu serta pengusaha gula. Akhirnya baru pada 5 November 1974 pemerintah Indonesia secara resmi menaikkan harga gula guna mengimbangi kenaikan harga bahan pokok lainnya. Harga gula pasir dari pabrik dinaikkan 21 persen dari Rp.112, 00/kg menjadi Rp. 135,5/kg.<sup>8</sup>

Memasuki tahun 1975 pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di beberapa daerah di pulau Jawa. Sesuai dengan Inpres No. 9/1975, prinsip dari program TRI adalah untuk mengganti sistem sewa menjadi suatu sistem di mana petani diberi hak untuk mengolah tanahnya sendiri.<sup>9</sup> Secara umum, tujuan dari program TRI adalah untuk menjaga stabilitas kebutuhan gula secara nasional, juga untuk

<sup>2</sup> R. Soekardjo Sastrodiharjo, *Gula dan Tebu Rakyat*, (Jakarta : Djawatan Pertanian, 1963) hlm 15.

<sup>3</sup> Kusbiyanto Adisasmito, "Siparap sebagai Kerangka Pendekatan dan Pengelolaan Resiko dan Ketidakpastian Usaha dalam Sistem TRI", makalah tgl 12 - 13 Maret 1984.

<sup>4</sup> Laporan wartawan Surabaya Post, 'Petani boleh menolak TRI', dalam *Surabaya Post*, 23 September 1989, hal. 1. Lihat juga "dan untuk dihindari kerawanan, Jember tuntaskan Masalah TRI" dalam *Surabaya Post*, 2 September 1989, hal. 3.

<sup>5</sup> R. Soekardjo sastrodihaerjo. *Gula dan Tebu Rakyat*. Jakarta: Djawatan pertanian, 1063. Hlm 15

<sup>6</sup> Leo Agung. *Mandiri Sejarah SMA kelas XI IPA*. Jakarta: erlangga, 2009. Hlm 82

<sup>7</sup> Mubyarto. 1991. *Gula dan Kajian sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. Hlm 33

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> Mubyarto. *Gula kajian Sosial- ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Medika. Hlm 17.

meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, secara implisit, tujuan dicanangkan program TRI juga dimaksudkan untuk memperluas lapangan kerja serta meratakan sebaran pendapatan di kalangan anggota masyarakat petani pedesaan pada khususnya.

Persoalannya sekarang, kenapa program yang pada mulanya diasumsikan dapat mengangkat taraf hidup petani di pedesaan tersebut, sebagian tidak berjalan lancar, bahkan tidak jarang justru memperoleh tantangan yang sedikit keras dari petani sendiri.

Dengan melihat berbagai kerugian diatas, maka tidak mengherankan jika banyak petani yang terkesan enggan bahkan sama sekali menolak program TRI. Akan tetapi, bukan berarti secara keseluruhan program TRI dinyatakan gagal dan membawa kerugian bagi petani di pedesaan. Berbalikan dengan fakta-fakta tentang kerugian petani seperti diuraikan diatas, sebenarnya tidak jarang juga ada sebagian petani lain yang merasa diuntungkan dengan adanya program TRI.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi penulis mengambil topik pergulaaan salah satunya adalah tenggelamnya swaswembada gula nasional yang disebabkan karena pro kontra antara tebu lokal dan tebu impor.<sup>10</sup> Hal itulah yang menyebabkan kesenjangan sosial para petani tebu. Hingga saat ini pascareformasi dan jatuhnya ORBA pimpinan Soeharto kerap kali masih dijumpai kasus sengketa lahan sampai harus mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Penulis beralasan memusatkan tempat penelitian di PG Kremboong dengan alasan lokasi pabrik tersebut dekat dengan lahan sawah rakyat desa Ketawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Sampai pada 1998 masih ada sekitar 50 PG warisan kolonial yang beroperasi menggunakan mesin tua yang sudah renta, diantaranya adalah PG Toelangan, PG Kremboong dan PG Gondang baru.<sup>11</sup> Obyek penelitian berikutnya yaitu para petani tebu di desa Ketawang kecamatan puri mojokerto. Hak tersebut diambil penulis dengan alasan sebagian besar mata pencaharian penduduk Puri adalah petani tebu yang sebagian lahanya berupa tegalan.

Dilihat dari uraian-uraian diatas, maka penelitian ini sengaja mengambil judul "Program TRI (Tebu Rakyat Intensif) di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 1975-1980." Beberapa permasalahan yang hendak diteliti, disamping mencoba mengetahui sejauh mana minat petani terhadap program TRI sekaligus juga mencari apa dampak dikeluarkannya program TRI di kalangan petani.

## METODE

Tahap pertama yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian adalah *Heuristik*. Heuristik merupakan metode yang digunakan dalam penulisan sejarah dengan mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti). Pada tahapan ini sangat penting sekali karena akan menentukan keabsahan dan validitas hasil tulisan nantinya. Beberapa sumber arsip yang berupa sumber tertulis diantaranya adalah majalah dan koran dan majalah perusahaan gula tahun 1975 serta surat keputusan pemerintah tentang kebijakan program TRI serta berita tahun 1977 tentang statistik tanaman tebu tahun 1975. Selain sumber arsip, penelitian ini juga ditunjang dengan adanya sumber buku- buku yang relevan dengan topik yang dikaji.

Penulis juga melakukan kunjungan ke perpustakaan Medayu, perpustakaan Mojokerto, perpustakaan daerah Surabaya. beberpa buku yang berhasil didapatkan adalah buku Gula Kajian Sosial-Ekonomi karangan Mubyarto Daryanti, Masalah Industri Gula Di Indonesia pengarang Mubiyarto. Di perpustakaan Daerah Surabaya penulis mendapatkan buku Gerakan sosial dan Demokratisasi pengarang Arif W. Djati dan buku tentang Pergolakan Petani dan Perubahan sosial yang dikarang oleh Henry A dan Yu G Alexander. Buku- buku tersebut hanya sebagian yang peneliti sebutkan, sementara masih banyak buku- buku lain yang relevan guna menunjang penelitian.

Sumber arsip peneliti dapatkan ketika melakukan PKL Jakarta tanggal 24-30 april 2010. Berbagai sumber buku didapatkan penulis dari PERPUSNAS Jakarta, PERPUSDA Surabaya serta Perpustakaan Medayu Agung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 1975, Presiden mengeluarkan Inpres No.9 tentang program tebu Rakyat Intensif (TRI) yang secara bertahap mengakhiri sistem penyewaan lahan pertanian oleh P.G dan menggantikanya dengan sistem pengusaha tebu oleh petani sendiri didukung dengan seperangkat sistem pengaturan, bimbingan, dan pelayanan. Peran pabrik gula tersebut juga beralih fungsi menjadi pembimbing dan pelayan petani TRI setra pengelola tebu petani berdasarkan aturan tertentu.

Dampaknya setelah muncul program TRI, petani yang pada mulanya hanya menerima uang sewa tanahnya saja sekarang mereka harus menanam sendiri lahan mereka. Biaya yang dikeluarkan petani pada tanam pertama lebih banyak dari pada tanam kedua. Untuk mengatasi masalah tersebut, petani meminjamnya dari KUD. Hasil panen petani tersebut nantinya dijual

<sup>10</sup> Majalah Indonesian Industry edisi maret 2013

<sup>11</sup> Agus Supriyono, dkk. 2013. TANPA JEDA ( Jejak langkah Industri Gula di Jawa). Jakarta asosiasi gula Indonesia. Hlm 19.

melalui KUD lalu oleh KUD hasil panen tersebut disalurkan ke pabrik dengan sistem bagi hasil. Jadi, peran KUD bisa dikatakan sebagai distributor.

Keberadaan program TRI tidak terlepas dari adanya beberapa kasus tentang adanya dominasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa oleh PG. Hal tersebut terjadi karena pabrik bergantung pada tanah, pekerja dan tenaga petani untuk memajukan pabrik gula, sementara bagi pihak petani diharapkan dapat memenuhi sumber penghasilan kebutuhan sehari-hari dari adanya program TRI.

Program TRI (Tebu Rakyat Intensif) bisa dikatakan merupakan program yang kurang bisa menyeluruh di semua kalangan masyarakat. Program tersebut cenderung menguntungkan pihak golongan masyarakat menengah ke atas. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pembangkangan terselubung petani dalam program Tebu Rakyat Intensif (TRI) sebagai upaya mempertahankan subsistensi.

Dampak dari adanya pro kontra seputar TRI salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan oleh beberapa orang. Perlawanan tersebut tergolong bukan tindakan dan di dukung oleh niat untuk bertahan, namun merupakan perlawanan simbolik yang hasil akhirnya tidak dapat diremehkan oleh pihak yang menjadi sasaran.

Tujuan perlawanan tersebut bukan untuk mengubah, apalagi menumbangkan sistem yang telah dicanangkan pemerintah. Tujuan dari golongan kaum proletar hanyalah untuk bertahan diri dalam sistem itu, dengan kerugian sekecil-kecilnya.

Secara umum bentuk respon Petani terhadap Program (TRI) yang dibentuk melalui Inpres No. 9 Tahun 1975 bisa dikategorikan telah menuai berbagai bentuk penolakan dan protes sosial atau semacam pro dan kontra. Bentuk penolakan terkadang bisa terjadi secara terbuka maupun terselubung. Salah satu contohnya yang terjadi di wilayah Kec. Puri, Kab. Mojokerto. Penduduk desa Kec. Puri sebagian besar menanam lahannya dengan tanaman tebu yang wilayahnya dekat dengan P.G Krembung, sehingga banyak dari lahan sawah penduduk yang disewa oleh pabrik tersebut.

Pembangkangan terselubung yang dilakukan oleh petani dalam program TRI adalah sebagai reaksi rasional guna mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi dalam program TRI. Pertentangan tersebut muncul dari disparitas antara petani miskin dan petani kaya dan petani miskin dan berbagai institusi yang mendominasi tata hubungan produksi tersebut melalui aplikasi program TRI.

Penerapan program TRI yang telah dicanangkan di masyarakat lebih tepat ditafsirkan sebagai suatu usaha tani kontrak (*contract farming*) yang banyak berisikan muatan kepentingan ekonomi-politik negara guna mencapai tujuan utama yaitu industri gula nasional. TRI sebagai Contract Farming berlangsung di dalam konteks fragmentasi tanah, yang mana intensifikasi justru menimbulkan biaya-biaya sosial tinggi.

Pembangkangan terselubung yang dilakukan para petani ini adalah salah satu contoh model 'perlawanan' yang berlangsung dalam konteks kuatnya hegemoni dan intervensi negara beserta kekuatan aparat birokrasinya.

(melalui program TRI itu). Sikap frontal yang ditunjukkan masyarakat merupakan bentuk "*self image*" dari suatu tanggapan rakyat sebab ketika suatu negara mengeluarkan kebijakan dan rakyatnya melakukan perlawanan dalam bentuk demo ataupun unjuk rasa maka hal tersebut sudah merupakan indikasi bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak berhasil dan justru merugikan rakyat. Harapan para petani ketika melakukan perlawanan tersebut segera direspon dan ditanggapi pemerintah sehingga pemerintah menghapus program tersebut atau membentuk program baru yang saranya minimal menguntungkan bagi kaum petani menengah ke bawah.

Korelasinya berdasarkan Inpres No.9/1975 yang memiliki tujuan mulia, seharusnya menjadikan petani "tuan di atas tanahnya sendiri", namun dalam realitasnya yang terjadi justru menjadi "buruh di tanahnya sendiri". Hal itu jelas ada sistem penyimpangan yang tidak sesuai dengan sintak yang ada dalam tahapan program TRI. Inilah yang nantinya berdampak pada munculnya krisis agraria.

Sikap pembangkangan terselubung petani itu dilakukan dengan cara keluar dari sistem produksi TRI. Dalam beberapa kasus, petani memiliki berbagai "siasat" halus yang cerdas (tidak konfrontatif) untuk membangkang yang dilakukan sesuai dengan yang dimusuhinya. Misalnya, siasat untuk "glebegan" (giliran tanam), siasat untuk tebang angkut, siasat untuk Jadwal Giling dan siasat Rendeman dan Bagi Hasil. Para petani tersebut mayoritas mengambil sikap melawan secara moderat dengan tujuan para pihak pimpinan pabrik tidak mencurigai kalau mereka telah melakukan boikot.

Mayoritas protes sosial yang dilakukan para petani dilakukan secara kolektif dalam kelompok-kelompok tertentu. Pembangkangan terselubung para petani TRI dapat dikategorikan sebagai teori "*everyday forms of peasant resistance*". Hal tersebut bisa terjadi karena mudahnya ikatan-ikatan tradisi desa, sehingga pembangkangan terselubung petani TRI tidak dalam upaya mempertahankan tradisi yang mengalami erosi akibat komersialisasi dan perluasan pasar.

Teori pembangkangan terselubung merupakan tindakan rasional dan individual para petani dan bersifat tertutup serta berlangsung dalam kelompok yang relatif kecil yang hanya terjadi di beberapa daerah tertentu, tidak berlangsung secara serentak di Indonesia. Sebagaimana dikatakan Samuel Popkin "sebab menurutnya pengalaman pembangkangan TRI tidak bersifat terbuka, berlangsung secara informal, tidak dinyatakan, dan dalam skala kecil."

Terdapat istilah pabrik gula tidak akan bisa hidup tanpa petani tebu, namun petani tebu juga tidak akan dapat eksis tanpa pabrik gula, hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak ini saling membutuhkan. Jika keduanya dapat berjalan secara berkesinambungan mungkin bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme karena dalam realitanya yang terjadi adalah simbiosis parasitisme. Berpedoman pada potret itulah akhirnya terbentuk kemitraan antara pihak pabrik dengan para petani yang terefleksi melalui sistem tani kontrak yang terbungkus dalam program TRI.

Kemitraan itu seharusnya saling membantu, saling percaya, saling terbuka, saling menguntungkan, saling menjaga dan lain-lain, namun yang terjadi adalah kebalikan dari itu. Dalam kemitraan ini tidak ada lagi saling percaya yang ada hanya rasa prasangka yang buruk satu sama lain, misal dalam menyikapi rendahnya rendemen antar PG dan Petani saling menyalahkan, di pihak petani menganggap PG sudah tua dan tidak efisien lagi sehingga tingkat kehilangan rendemen sangat tinggi, sedangkan dari pihak PG menyalahkan petani yang sudah meninggalkan kaidah budidaya yang benar, penggunaan pupuk sipramin yang besar-besaran dan tebang angkut yang cenderung asal-asalan. Intinya antara PG dan pihak pabrik saling menaruh rasa kecurigaan yang akhirnya memicu tindakan kecurangan secara terselubung.

Berawal dari adanya fenomena tersebut pasti ada *miss link*, sehingga kemitraan itu tidak berjalan sesuai harapan. Ada beberapa solusi yang mungkin dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama adalah merubah pola kemitraan ini, dobrak semua penyimpangan-penyimpangan, apa lagi yang berbau kepentingan pribadi. Semua pihak hendaknya mempunyai kesadaran pribadi untuk tidak mementingkan kepentingan golongannya. Pola kemitraan harus memenuhi asas:

1. saling percaya
2. saling terbuka
3. saling menguntungkan
4. saling bertanggung jawab
5. komitmen
6. konsekuen

Demi mewujudkan terlaksananya asas itu maka perlu di buat aturan main yang jelas. Dengan demikian perlu di bentuk sebuah satgas yang terdiri dari:

1. Pabrik Gula
2. petani (petani besar dan petani kecil) paguyuban profesi petani tebu (APTR)
3. dinas pemerintah terkait (Dishutbun, deperindag)
4. lembaga peneliti (lembaga riset)

Setelah anggota satgas terbentuk, maka di tentukan tugas dan peranan masing-masing demi tercapainya sasaran bersama dalam hal ini produktivitas dan rendemen tebu. Sebenarnya satgas seperti ini pernah di lakukan oleh pabrik gula dan asosiasi petani, namun masih dalam lingkup kecil (pengawasan penghitungan rendemen) belum di lakukan secara terpadu mulai tanam sampai panen (tebang angkut) dan pengolahan gula dalam pabrik.

Apabila ini bisa di laksanakan maka rasa prassangka buruk yang ada lambat laun akan hilang dengan sendirinya, beberapa pabrik gula di luarnegeri sudah menerapkan sistem semacam ini. Pada awalnya memang sulit namun penataan harus di lakukan secara menyeluruh dan tidak boleh di lakukan secara terpisah.

Sebagai catatan tambahan pabrik gula harus berani dan transparan dalam penghitungan rendemen, salah satunya dengan meminimalkan campur tangan manusia dalam penghitungan rendemen, yaitu dengan cara otomatisasi secara keseluruhan mulai dari penghitungan brix, pol, glucose sucrose yang secara langsung masuk dalam server komputer. Jadi inputan data tanpa di ketik oleh manusia, sehingga prasangka yang buruk dapat di hindari. (sistem terintegrasi mulai dari brix digital, dan sucromat terpasang dalam satu server sehingga langsung muncul angka rendemen). Dengan demikian, diharapkan dapat terwujudnya swasembada gula yang maju serata adil di Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Perkembangan zaman semakin kompleks dan era pasar bebas di depan mata, pemerintah harus mampu melindungi dan bersaing dengan negara lain agar komoditi gula tetap berada pada posisinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi adanya aliran ekonomi kapitalis. Persoalan pergulaan yang dihadapi pemerintah menjadi salah satu masalah serius yang patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut terlihat dari fenomena ketika produksi gula dalam negeri meningkat pada bulan agustus 2010, pemerintah justru berencana menfimpor gula sebanyak 500 ton. Jika hal tersebut terjadi, bisa dipastikan petani gula dalam negeri akan menderita kerugian karena kalah bersaing dengan gula impor.

### Saran

Mengingat penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka beberapa sarn untuk peneliatan selanjutnya adalah:

1. Pembedaan komoditas gula atas berbagai jenis seperti raw sugar, refined sugar ataupun white sugar perlu menjdi sasaran utama penelitian untuk dapat mencerminkan permintaan impor bagi masing- masing jenis komoditi, yang nantinya dapat berpengaruh pada penghasilan para petani tebu
2. Dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk mkenetapkan kebijakan pergulaan terutama menyangkut taraf kesejahteraan petani kecil.
3. Bagi pembaca diharapkan ih bijak dalam memilih produk impor dan produk lokal dalam hal pergulaan.
4. Transparansi pemerintah snagt diharapkan bagi keberlangsungan program- program selanjutnya agar tidak terjadi kecurigaan sosial.
5. Minat petani tebu di Dsn. Ketawang, Ds. Tampungrejo Kec. Puri Mojokerto terhadap TRI tergolong tinggi bagi

petani kaya. Petani kaya tersebut tergolong pihak yang pro.

6. Pihak kontra petani tebu di Dsn ketawang kebanyakan terletak di golongan petani miskin. Artinya respon petani tebu di Kec puri Mojokerto tergolong seimbang ada yang pro dan ada yang kontra.

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 162 tahun 1958

Berita tahun 1977, Statistik tanaman tebu tahun 1975 dan 1976. Balai Penyelidikan Perusahaan perkebunan gula

Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang PERDA.

### Sumber Majalah dan makalah serta Koran

Surabaya Post. 2 September 1989. Untuk Hindari Kerawanan Jember tuntas Masalah TRI

Surabaya Post 25 Juli 1989. Tertangkap, Tersangka Kasus juring paksa.

Majalah Indonesian Industry. Maret 2013.

Majalah Revitalisasi Industri gula. Maret 2013. Asosiasi Gula Indonesia

Majalah Perusahaan gula Th. X No.1 April 2014. Balai Penyelidikan Perusahaan Gula Pasuruan

Makalah Sikap Petani di Pedesaan terhadap program TRI. Tahun 1990. Lembaga Penelitian universitas airangga

### Sumber Buku

Arief W. Djati. t.th. *Gerakan Sosial dan Demokratisasi*. Panitia 25 Tahun FISIP Universitas Airlangga.

Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

Dawam Rahardjo. 1984. *Transformasi Pertanian, industrialisasi, dan kesempatan kerja*. Jakarta: UI Press

Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian*. Jakarta: Bhratara

H. Cokro. 1981. *Pembangunan Desa, Fokus pembangunan nasional dalam analisa*. Jakarta: CSIS.

Kasdi, Aminuddin. 2008. *Memahami sejarah*. Surabaya: Unesa press.

Kurosawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan kontrol: Studi tentang Perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.

Landsberger, Henry A dan YU G. Alexanderov. 1981. *Pergolakan Petani dan perubahan sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.

Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Mubyarto. 1991. *Gula Kajian Sosial – Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Masri Singarimbun dan D.H. Penny. 1984. *Penduduk dan Kemiskinan*. Jakarta: Bratara.

Scott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.

Soekardjo Sastrodihardjo. R. 1963. *Gula dan Tebu Rakyat*. Jakarta

Supriyono, agus dkk. 2013. *TANPA JEDA (Jejak Langkah Industri Gula di Jawa)*. Jakarta: Asosiasi gula Indonesia